

SINERGITAS PROGRAM “*FANTASTIC! PONOROGO*” DALAM RANGKA PEMBANGUNAN PARIWISATA BERBASIS *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DI KABUPATEN PONOROGO

Irfan Nugroho¹, Yusuf Adam Hilman²

¹²Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Jl. Budi Utomo No.10, Ronowijayan, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471

E-mail: mr.irfannugroho@gmail.com, 545471adamongis@gmail.com

ABSTRAK. *Fantastic! Ponorogo* merupakan program pembangunan pariwisata yang bersinergi antara Visi dan Misi dari Bupati Kabupaten Ponorogo yang telah diuraikan dalam RPJMD 2016 – 2021. Kajian ini berbicara tentang keterkaitan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur, dan RPJMD Kabupaten Ponorogo. 2019 merupakan tahun kunjungan wisata di Provinsi Jawa Timur. Pelaksanaan praktik *Collaborative Governance* yang menggambarkan proses kemitraan antara pemerintah dengan pihak swasta, bertujuan untuk mengoptimalkan tujuan kegiatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu sinergitas program *Fantastic!Ponorogo* dalam rangka praktik *collaborative Governance* dalam sektor Pariwisata yang dilakukan di Kabupaten Ponorogo. Dalam studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Praktik *Collaborative Governance* memperlihatkan sinergitas yang efektif dan berhasil, karena beberapa faktor, diantaranya: 1) adanya komitmen dari Bupati, Wakil Bupati dan seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dalam hal ini para kepala dinas yang *supportive* terhadap pelaksanaan tahun wisata 2019, 2). Terwujudnya: kolaborasi, *Conectivity* antar *stakeholder*, 3). Meningkatnya antusias Masyarakat yang sangat aktif dalam berbagai *event* yang diselenggarakan, 4). Media pembelajaran bagi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Kata Kunci: *Synergy; Collaborative Governance; Fantastic! Ponorogo; Tourism Development;*

THE SYNERGY OF FANTASTIC PONOROGO PROGRAM IN THE CONTEXT OF COLLABORATIVE GOVERNANCE-BASED TOURISM DEVELOPMENT IN PONOROGO REGENCY

ABSTRACT. *"Fantastic!Ponorogo"* is a tourism development program coordinated between the vision and mission of the Ponorogo Regency in disassemble in RPJMD 2016 - 2021. This talk about studying RPJMN, RPJMD, Province Of East Java, and RPJMD Ponorogo Regency. 2019 was a tourist visit to East Java. The implementation of the collaborative governance practices described the processes partnership between the government and the private sector, aimed at optimizing the objectives of the activities. The purpose of this research is to find out the synergy *"Fantastic!Ponorogo"* to collaborative governance practices in the tourism sector conducted in Ponorogo Regency. In this study in qualitative research. The collaborative governance showS synergy, effective, and successful because of some factors, including 1). The commitment by the Bupati, vice-regent, and all his staff the government Ponorogo Regency in this case the head of supportive tourism of the year 2019, 2). A, collaboration connectivity among stakeholders, 3)The enthusiastic people who are active in various events held, 4). The basis for the government in government duty.

Key words: *Sinergitas; Colaborative Governance; Fantastic! Ponorogo, Pembangunan Pariwisata*

PENDAHULUAN

Era Disruptif yang sedang kita hadapi, telah banyak membawa perubahan dalam aktifitas pemerintahan, dalam praktik pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih, kemudian membawa konsekuensi pada praktik pemerintah yang harus memunculkan inovasi atau terobosan baru melalui sentuhan teknologi yang menjadikan kegiatan yang dilakukan menjadi lebih profesional, modern dan terukur, sehingga dapat mencapai tujuan yang di harapkan.

Pariwisata merupakan salah satu sektor

yang sangat berkembang pesat, dimana sektor ini dikategorikan sebagai sektor penerimaan bukan pajak, yang dianggap mampu meningkatkan pendapatan asli daerah, selama ini aktifitas pembangunan pariwisata dianggap kurang maksimal, karena masih menitikberatkan pada upaya formal, yang kurang efektif dan efisien, karena dianggap monoton tanpa ada perubahan atau penyesuaian terhadap perkembangan dunia secara global.

Sektor pariwisata sebenarnya memiliki peluang untuk dikembangkan dan di kelola secara profesional, sehingga upaya pemasaran dan juga

pembangunan di sektor ini, bisa berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. peluang pembangunan sektor pariwisata memunculkan sebuah peluang bagi pelibatan pihak – pihak terkait *stakeholder* untuk menyusun strategi dalam rangka pencapaian tujuan pemerintah.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pariwisata menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor utama pengembangan nasional melalui target kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara pada 2019. Pariwisata menjadi sektor unggulan yang diharapkan diikuti oleh pemerintah di daerah di seluruh wilayah Indonesia. Daerah-daerah di Indonesia memiliki potensi pariwisata yang diharapkan mampu memberikan manfaat positif bagi masyarakat melalui kegiatan pariwisata.

Target pemerintah tersebut tidak hanya menjadi tugas sekelompok anggota masyarakat, tetapi melibatkan berbagai unsur sehingga dibutuhkan sinergi antara berbagai kelompok masyarakat yang ada di suatu wilayah geografis atau destinasi wisata. Menteri Pariwisata Republik Indonesia menekankan pentingnya target pariwisata dalam lima tahun ke depan yakni kenaikan dua kali lipat dengan kontribusi PDB nasional sebesar 8% dengan devisa sebesar Rp. 280 triliun. Kunjungan wisatawan yang meningkat sebagaimana yang ditargetkan tersebut diharapkan mampu mendorong ketersediaan lapangan kerja bidang pariwisata sebanyak 13 juta orang. Hal ini dimaknai sebagai pentingnya melibatkan berbagai unsur yang ada untuk membantu tercapainya sasaran pengembangan pariwisata nasional.

Model kerjasama secara kelembagaan tidak lagi hanya mengandalkan peran pemerintah, pelibatan berbagai pihak, seperti: komunitas masyarakat, LSM dan NGO, merupakan hal yang harus perlu di tingkatkan, sehingga tugas menjadi lebih ringan dan actor yang terlibat semakin banyak, melalui model *collaborative government*.

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu wilayah administrasi dari Provinsi Jawa Timur, yang melakukan praktik pengembangan pariwisata melalui penguatan potensi pariwisata lokal yang dimiliki, Potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Ponorogo sangat beragam, mulai dari : wisata budaya, religi, alam, gastronomi, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di wilayah tersebut, Kabupaten Ponorogo mengalami

peningkatan dalam rentang waktu 2011-2015. Jumlah wisatawan mengalami peningkatan sekitar 2% disetiap tahunnya (Ponorogo D. P., 2016). Data terkait daya tarik wisata atau obyek wisata di Kabupaten Ponorogo tercatat sejumlah 50 buah, yang terdiri dari: 31 wisata alam, 9 wisata religi dan sejarah, serta 10 wisata buatan (Ponorogo D. P., 2016). Kondisi tersebut kemudian menjadikan Kabupaten Ponorogo, menetapkan sektor pariwisata menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Ponorogo 2016-2021, pada tahun 2019 pariwisata menjadi fokus pembangunan utama (Ponorogo P. K., 2016).

Bupati Kabupaten Ponorogo pada periode 2016-2021, melalui misinya di poin 2 (kedua), menyebutkan, jika akan melakukan optimalisasi sektor pariwisata daerah dengan beberapa indikator, seperti: jumlah destinasi wisata, dan jumlah kunjungan wisata sebagai tolak ukurnya, selain itu, disebutkan bahwa arah kebijakan di sektor pariwisata adalah mengembangkan dan membangun pusat-pusat wisata unggulan dengan membuka peluang kerjasama dengan swasta serta meningkatkan pemasaran dan jaringan pariwisata serta kerjasama antar daerah dan asosiasi terkait. Sehingga dalam hal ini diperlukan suatu sinergi dari berbagai pihak terkait (Ponorogo P. K., 2016).

Aktualisasi dari visi dan misi Bupati, kemudian di realisasikan melalui program “*Fantastic! Ponorogo*”, kemudian program ini secara kelembagaan telah di kaji secara sistematis dengan melakukan sinkronisasi antara visi dan misi di level nasional melalui RPJMN, di level daerah melalui RPJMD Provinsi Jawa Timur serta dengan RPJMD Kabupaten Ponorogo supaya dapat bersinergi dan berjalan beriringan.

Tahun Wisata 2019 Kabupaten Ponorogo pada dasarnya diproyeksikan menjadi sajian spesial bagi pariwisata Indonesia di tahun 2019, khususnya di Jawa Timur. Sekitar 80 *event* akan saling bersambung secara berurutan sepanjang tahun. Momentum tersebut harus tentunya harus dapat dikomunikasikan secara tepat kepada publik sebagai target pasar wisatawan. *Branding “Fantastic! Ponorogo”* diharapkan tidak hanya sekedar menjadi slogan maupun *jargon* semata, melainkan juga sebagai bentuk ekspresi serta janji Tahun Wisata 2019 kepada wisatawan, yang diharapkan mampu menjadi sajian spektakuler di tahun kunjungan

wisata Kabupaten Ponorogo, melalui konsep *Fantastic Experience* (pariwisata.ponorogo.go.id, 2019).

Upaya pemerintah Kabupaten Ponorogo tidaklah mudah dalam rangka mewujudkan Tahun kunjungan wisata di tahun 2019, berbagai kegiatan yang di rancang memiliki berbagai tantangan yang bisa menjadi penghambat dalam pencapaian tujuan. Beberapa hambatan yang jadi persoalan pengembangan pariwisata di Kabupaten Ponorogo diantaranya adalah: 1). Minimnya kerjasama antar daerah khususnya di wilayah Eks-Karisidenan Madiun dalam rangka membangun kelembagaan pariwisata lokal, 2). Lemahnya pengembangan kawasan wisata unggulan di Kabupaten Ponorogo, 3). *Connectivity* atau keterhubungan kawasan Jawa Timur di wilayah penyangga khususnya di bagian Barat yang menghubungkan Madiun Ponorogo dengan Provinsi Jawa Tengah, sebagai pintu masuk investasi dan wisatawan.

Pembangunan pariwisata di kabupaten Ponorogo memerlukan upaya kemitraan lintas daerah yang dapat menopang aktifitas yang ada di wilayah Eks – Karisidenan Madiun, yang meliputi wilayah: Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, Ponorogo (<https://ponorogo.go.id>, 2019)

Kabupaten Ponorogo memiliki kawasan unggulan yakni telaga ngebel, namun pengembangan kawasan ini tidak kunjung menemukan model yang tepat, sehingga hanya berjalan stagnan, sehingga diperlukan upaya pengembangan kawasan tersebut (<https://m.solopos.com>, 2019)

Belum terbukanya akses di wilayah Barat Provinsi Jawa Timur, khususnya di Wilayah Madiun dan Ponorogo, mengingat kawasan tersebut berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, jika sudah terhubung, maka dapat menjadi faktor penggerak aktifitas investasi dan pariwisata (<https://surabaya.bisnis.com>, 2019).

Hambatan dalam praktik *Collaborative Governance* di Kabupaten Ponorogo menjadi hal penting untuk di petakan, mengingat keberadaan pengembangan wisata, bukan upaya yang mudah, sehingga memerlukan strategi yang sistematis, terukur, dan berorientasi terhadap rakyat, supaya nantinya dapat mencapai tujuan secara optimal.

Kajian ini berupaya mengungkap pelaksanaan tahun kunjungan wisata 2019 di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kabupaten

Ponorogo dengan tajuk *Fantastic! Ponorogo*”, bagaimanakah bentuk dari praktik *Collaborative Governance* tersebut.

Sinergitas dan Collaborative Governance

Sinergitas sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri sendiri, selain itu gabungan beberapa unsur akan menghasilkan suatu produk yang lebih unggul. Oleh sebab itu, sinergitas dalam pembangunan berarti keterpaduan berbagai unsur pembangunan yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Sinergitas akan mudah terjadi bila komponen - komponen yang ada mampu berpikir sinergi, terjadi kesamaan pandang dan saling menghargai (Wati, 2013).

Konsep sinergitas dalam kajian pemerintahan lebih dikenal dengan istilah *Collaborative Governance*, istilah ini merupakan sebuah strategi yang menekankan pada model kolaborasi tidak hanya dengan instansi pemerintah, namun juga dengan berbagai lembaga non pemerintah, seperti LSM, ataupun NGO.

Collaborative Governance merupakan implementasi dari adanya konsep “*multipatrn governance*” yang meliputi sektor privat, masyarakat dan komunitas sipil dan terbangun atas sinergi peran stakeholder dan penyusunan rencana yang bersifat *hybrid* seperti halnya kerjasama *public-privat* dan *privat-sosial* (Novy Setia Yunas, 2019) .

Collaborative Governance merupakan model pengaturan pemerintahan dimana satu atau lebih badan publik secara langsung mengikutsertakan stakeholder non pemerintah, dalam rangka pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, yang nantinya akan menghasilkan keputusan secara konsensus dan deliberative, dengan tujuan membuat sebuah kebijakan umum atau mengelola program atau aset publik (Khoirun Nisa, 2020)

The implementation of collaborative governance has several objectives that can provide benefits to the government. Collaboration can be a solution in resolving complicated public affairs, the answer to the failure of policy implementation, budget efficiency, can mobilize the political interests of each actor and reduce the conflicts between

interest groups that are sometimes difficult to suppress. In other words, collaboration is done because of the complexity of the interdependence of each institution. The partnership is also considered to be a result of the diversity of interests between each group, thus giving rise to a collaboration (Istayu Prastitaning Utami, 2019).

Model kolaborasi pemerintah tentunya dilakukan dalam rangka mencapai tujuan, hal ini terkait erat dengan berbagai tugas pokok dan fungsi dari pemerintah, melalui berbagai program yang dilakukan baik di level pusat maupun daerah.

Salah satu sektor yang saat ini menjadi pusat perhatian pemerintah adalah wisata, mengingat aktifitas pembangunan pariwisata ini melibatkan banyak sekali pihak, maka perlu di cermati bagaimana sebenarnya praktik pembangunan itu dilakukan.

One of efforts by government to obtain foreign-exchange income (devisa) in this era is by advancing tourism sector. Therefore, it is necessary to be prepared and to spruce up including in its management and development. Government has appointed tourist destinations in Indonesia, but there are still many other potential places. Thus it is necessary to have specific skills and creativity so that planning and research on tourist destination can really achievable. Tourism is expected to trigger and mobilize public economic growth, national foreign-exchange income, to create job opportunities, and to improve public wel-fare. Tourism is also an incentive modernization symptom that is significantly related to community life at local, national, and global dimensions and involving people in developed and developing countries (Fernandes Simangunsong, 2018)

Sektor pariwisata sebagai salah satu sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu Negara, tentu mempunyai peran yang strategis yang berkaitan dengan ketersediaan komoditas pendukung kepariwisataan seperti transportasi, akomodasi, hiburan, jasa-jasa dan lain sebagainya. Sehingga ketersediaan faktor penunjang sektor pariwisata tersebut dapat mempengaruhi GDP maupun ketenagakerjaan (Mudrikah, Sartika, Yuniarti, Ismanto, & Satia, 2014)

Pembangunan Pariwisata

Pembangunan merupakan sebagai suatu

usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*) (Hadiawan, 2006).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik tempat wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Dalam hal ini suatu daerah tentunya bisa menjadi daya tarik wisata yang artinya segala sesuatu yang memiliki keunikan seperti keindahan dan juga nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata.

Pembangunan pariwisata Indonesia telah tercermin dalam rencana strategi yang dirumuskan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, yakni:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta pemerataan pembangunan di bidang pariwisata;
- b. Mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkesinambungan sehingga memberikan manfaat sosial-budaya, sosial ekonomi bagi masyarakat dan daerah, serta terpeliharanya mutu lingkungan hidup;
- c. Meningkatkan kepuasan wisatawan dan memperluas pangsa pasar; dan

Menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan pariwisata Indonesia yang berdayaguna, produktif, transparan, dan bebas KKN, sehingga dapat melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, sebagai amanah yang bisa dipertanggungjawabkan (*accountable*) (Indonesia).

Fantastic! Ponorogo

Tahun Wisata 2019 sebagai program prioritas Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah resmi dibuka dan dimulai di awal tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini Dinas Pariwisata Ponorogo bersama *stakeholder* lain dari sector swasta dan masyarakat telah mempersiapkan berbagai persembahan atraksi

wisata untuk menyambut kunjungan wisatawan ke Ponorogo, dalam tajuk *Calendar of Event* Pariwisata Ponorogo 2019.

Calendar of Event (CoE) Pariwisata Ponorogo 2019 terdapat total 80 *event*, terdiri dari pementasan rutin bulanan Reyog Bulan Purnama, Wayang Kulit, Reyog Telaga Ngebel dan Teater. Sejumlah *event* rutin tahunan seperti Peringatan Hari Jadi Ponorogo & Perayaan Grebeg Suro, Festival Reyog Mini, Festival Nasional Reyog Ponorogo, serta beberapa *event* baru berskala massal-nasional-internasional seperti Gebyar 2019 Penari Jathil, Reyog Jazz dan Festival Topeng Internasional (IMAFEST). Sejumlah *event* perlombaan juga turut digelar, seperti Festival Dalang Bocah, Lomba Foto dan Video, Lomba Tari Kreasi dan Lomba Nyethe. Tak ketinggalan, *event-event* yang bersifat eksebisi juga dilaksanakan untuk memeriahkan Tahun Wisata 2019, seperti Batik Ponorogo Street Exhibition, Festival Angkringan, serta Festival Kuliner Khas Ponorogo (pariwisata.ponorogo.go.id, 2019).

Tahun Wisata 2019 mengangkat branding yaitu *Fantastic!Ponorogo* dengan *tagline* ajakan *Ayo ke Ponorogo*. Branding dan *tagline* tersebut telah disusun sedemikian rupa untuk mempertegas citra dan memberikan kesan persuasif bagi target wisatawan. Branding dan *tagline* tersebut secara simultan dan terintegrasi akan ditampilkan di berbagai media promosi dan publikasi Tahun Wisata 2019 (pariwisata.ponorogo.go.id, 2019).



Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo (2019)

Gambar 1. Branding dan Tagline Tahun Wisata 2019

Penggunaan *branding* dan *tagline* dalam strategi promosi Tahun Wisata 2019 diproyeksikan dapat mendorong antusiasme wisatawan untuk berkunjung ke Ponorogo. Hal tersebut sesuai dengan target yang dicanangkan Dinas Pariwisata Ponorogo untuk mendatangkan setidaknya 200 orang wisatawan mancanegara dan 575 ribu wisatawan nusantara pada tahun 2019. Hal itu meningkat dari capaian pariwisata Ponorogo tahun 2018 yang berhasil mendatangkan total 117

wisatawan mancanegara dan 538 ribu wisatawan nusantara (pariwisata.ponorogo.go.id, 2019).

METODE

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Susanti & Lubis, 2015)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun alasan penggunaan metode ini adalah karena ia lebih mampu mendekatkan peneliti dengan objek yang dikaji, sebab peneliti langsung mengamati objek yang dikaji dengan kata lain peneliti bertindak sebagai alat utama riset (*human instrument*) (Sutopo, 2002).

Metode penelitian kualitatif bagaimana jenis metode ini lebih *flexible* bisa berubah untuk menyesuaikan dengan kondisi di wilayah tersebut, sehingga peneliti bisa merubah desain sesuai dengan kebutuhan (Gondo Widodo, 2019)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yang menekankan pada pemahaman terkait persoalan yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat terkait dengan hubungan – hubungan, kegiatan, sikap, pandangan dan juga proses yang sedang berlangsung atau sedang dilaksanakan (Simamora & Sinaga, 2016)

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo, tepatnya dilakukan di kantor tersebut yang merupakan pelaksana teknis program *Fantastic!Ponorogo* pada Tahun Wisata 2019, sehingga diharapkan dapat digali informasi lebih dalam mengenai sinergitas program *Fantastic!Ponorogo* terkait dengan upaya *Colaborative Governance* dalam rangka pembangunan pariwisata di Kabupaten Ponorogo.

Penentuan informan melalui *purposive sampling* yaitu dengan menentukan sejumlah informan dengan cara sengaja karena alasan yang diketahui sifat sampel tersebut. Informan yang dipilih dianggap mempunyai pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti dan perolehan sumber data secara langsung. Informan yang telah ditentukan dalam penelitian ini antara lain Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo, Kepala Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo, Ketua Tim Pariwisata PNG dan Anggota Tim Pariwisata PNG. Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan keterangan yang

dibutuhkan dalam suatu penelitian (Sugiyono, 2017).

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data nya langsung, bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, ataupun, diskusi terfokus (Simangunsong, 2017). Data sekunder merupakan data yang di kumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber, seperti: buku, data pemerintah, jurnal, arsip, dan data pribadi (Arikunto, 2013).

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode Wawancara, Observasi, Dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis Miles dan Huberman (Huberman, 1992). Miles dan Huberman menyatakan jika membagi 3 tahapan dalam proses analisis data, yakni sebagai berikut: *Data Reduction* (Reduksi Data), *Display data* (Penyajian Data), *Conclusion Drawing* (Verifikasi) (Afifah & Yuningsih, 2016).

Secara skematis proses analisis data dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: (Huberman, 1992)

Gambar 2. Skema Analisis Data

Penyusunan kesimpulan dan verifikasi dalam sebuah penelitian yang sudah dilakukan perlu dilakukan proses pengulangan dengan cara mencocokkan pada reduksi data, display data supaya kesimpulan yang disajikan bisa mendapatkan keabsahan (Wulandari, Suranto, & Purnomo, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dokumen Pembangunan Pariwisata

Program *Fantastic! Ponorogo* dilaksanakan sesuai dengan arahan *masterplan* yang telah dirancang dan dibuat, dengan berpedoman RPJMD dan instruksi Bupati, terkait persiapan mengenai

tahun wisata 2019.

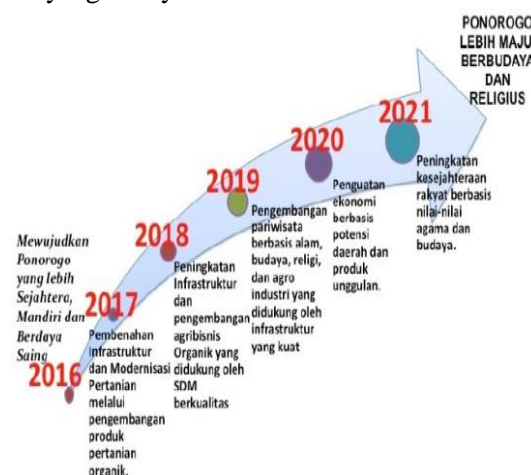
RPJMD 2016 - 2019	RPJMD Propinsi Jawa Timur 2016 - 2019	RPJMD Kabupaten Ponorogo 2016 - 2021
VISI : "Terwujudnya Indonesia Yang Beradulat, Mandiri dan Berkeadilan Berdasarkan Gotong Royong" MISI :	VISI : "Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak" MISI :	VISI : "Ponorogo Lebih Maju, Berbudaya dan Religius" MISI :
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengintegrasikan sumberdaya maritim, darat, dan udara sebagai Negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. 5. Mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. 6. Mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dalam keberadaban.	1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. 2. Meningkatkan pengalihan ekonomi yang mandiri, produktif, dan berdaya saing, berbasis agribisnis, pariwisata, dan industri kreatif. 3. Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan, dan penataan ruang. 4. Meningkatkan "Kedaulatan" bangsa dan pembangunan hukum. 5. Meningkatkan "keadilan" ketahanan sosial dan ekonomi bangsa. 6. Meningkatkan "keadilan" ketahanan sosial dan ekonomi bangsa.	1. Membentuk budaya keteladanan pemimpin yang efektif, guna mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang amanah, tanggap dan bertanggung jawab dalam memecahkan masalah. 2. Mengembangkan sumberdaya daerah menjadi lebih berdaya saing, unggul, produktif dan berkeadilan serta kemakmurat luas secara ekonomi dan sosial melalui investasi, industri, perdagangan dan pengembangan pariwisata menjadi locomotif penggerak perekonomian daerah. 3. Mewujudkan pelayanan infrastruktur strategis secara profesional agar memiliki daya dukung yang layak untuk untuk menolong produktivitas masyarakat, kemajuan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. 4. Membangun pertanian sebagai penggerak model berbasis ekonomi kerakyatan yang berdaya saing tinggi. 5. Menata kawasan yang nyaman untuk semua, dengan ketersediaan ruang publik yang memadai dan berwawasan lingkungan. 6. Membangun privasi kemudaran dalam upaya pembangunan masyarakat dan desa miskin, pengurangan serta perbaikan kesempatan kerja, dan melindungi hak-hak masyarakat yang berlandaskan pada pengkangan hukum yang berkeadilan. 7. Meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah dalam memajukan sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat guna mendorong kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, mempunyai kompetensi yang cukup. Membangun Jawa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga yang bertakwa, berbudaya dan berkeadilan.

Sumber : RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (2016)

Gambar 3. Matrik Keterkaitan Visi dan Misi RPJMN, RPJMD Propinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten Ponorogo

Kelembagaan Pemerintah

Peran Dinas Pariwisata sangat vital dalam rangka pembangunan pariwisata melalui program *Fantastic! Ponorogo*. Bupati Ponorogo melalui RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 memberikan porsi tanggung jawab yang luar biasa besar di tahun 2019 dibandingkan dengan dinas-dinas yang lainnya.



Sumber : RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (2016)

Gambar 4. Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021

Peran Dinas Pariwisata dalam hal ini adalah eksekutor dari rencana pemerintah daerah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi termasuk juga penganggaran. Dilihat secara teknis

Dinas Pariwisata berperan sangat aktif, tetapi dalam hal ini Dinas Pariwisata juga melibatkan beberapa komunitas, *stakeholder*, dan lain sebagainya.

Realisasi peran Dinas Pariwisata melalui program *Fantastic!Ponorogo* ini terwujud berupa penyelenggaraan dan pelaksanaan 80 lebih *event* pariwisata yang digelar dan 10 *top event* yang menjadi unggulan di tahun wisata 2019 ini, dimana semuanya bertujuan untuk mengajak wisatawan baik di dalam maupun di luar Kabupaten Ponorogo dan wisatawan mancanegara.



Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo (2019)

Gambar 5. Calendar of Events 2019

Dinas Pariwisata menjalin koordinasi atau hubungan dengan *stakeholder* dan pihak-pihak terkait melalui banyak cara. Di antaranya melalui rapat bersama kepala-kepala dinas yang lain hingga melaksanakan koordinasi dan menjalin komunikasi melalui grup-grup *WhatsApp* yang dibuat khusus berisi panitia dari penyelenggara satu acara tertentu. Selain itu juga, Dinas Pariwisata juga menerapkan sistem pihak ketiga. Dalam hal ini digambarkan sebagai sebuah segitiga piramida. Bagian atas segitiga piramida adalah pemerintah. Sisi kanan bawah adalah masyarakat. Dan sisi kiri bawah adalah *stakeholder*. Dalam artian pemerintah sebagai pihak pertama. Masyarakat sebagai pihak kedua sebagai penikmat dan *stakeholder* berada di pihak ketiga. Cara Dinas Pariwisata melakukan koordinasi dengan *stakeholder* ini yaitu dengan mengajak kerjasama dan bernegosiasi untuk mensukseskan program-program yang telah dibuat salah satunya dalam bentuk sponsor. Intensitas yang dilakukan Dinas Pariwisata dengan *stakeholder* dan pihak-pihak terkait dilakukan dengan sangat intens.

Lebih dari satu kali rapat kepanitiaan diselenggarakan. Bahkan lebih dari 3 kali rapat koordinasi bersama dengan jajaran pemerintah maupun dengan pihak-pihak terkait di luar pemerintah.

Pada taraf perencanaan maupun pelaksanaan Dinas Pariwisata tidak mengalami *overlapping* atau kejadian di luar kendali. Meskipun terjadi sedikit *miss* komunikasi, tetapi hal tersebut tidak menyebabkan *overlapping* yang begitu berarti.

Program *Fantastic!Ponorogo*

Fantastic!Ponorogo merupakan branding pariwisata di tahun wisata 2019 sebagai langkah untuk mensukseskan RPJMD yang telah dibuat. Program *Fantastic!Ponorogo* diharapkan mampu memberikan sensasi berbeda kepada para wisatawan, baik dari dalam maupun luar Kabupaten Ponorogo yang berkunjung ke Kabupaten Ponorogo.

Pelaksanaan program *Fantastic!Ponorogo* dalam rangka pembangunan pariwisata yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Pariwisata menjadi sangat penting sifatnya. Peran tahun wisata 2019 dengan *Fantastic!Ponorogo* menjadi momentum yang langka. Meskipun hanya berlangsung selama satu tahun, tetapi hal ini menjadikan seluruh jajaran yang terlibat saling bahu-membahu membantu pekerjaan Dinas Pariwisata selama bertahun-tahun. Sehingga apa yang dilakukan Dinas Pariwisata di tahun-tahun sebelumnya menjadi sangat terbantu dengan adanya pelaksanaan tahun wisata 2019 ini.

Implementasi pelaksanaan program *Fantastic!Ponorogo* sendiri dengan menggunakan media yaitu berbagai macam festival-festival atau kegiatan-kegiatan tradisi budaya yang intinya membangun sebuah inovasi baru. Pembangunan-pembangunan sedikit banyak telah dirasakan oleh masyarakat. Tidak hanya berupa pembangunan fisik saja, namun juga pembangunan dalam bentuk sistem.

Program yang menjadi fokus dalam *Fantastic!Ponorogo* adalah penyelenggaraan *event*, *event* ini diterjemahkan dan diaplikasikan ke dalam beberapa tujuan. Seperti halnya mempublikasikan potensi pariwisata Kabupaten Ponorogo. Sehingga dengan banyaknya *event* pariwisata yang digelar menjadikan momentum bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk bisa mempromosikan

seluruh potensi wisata yang dimiliki. Selain itu juga Pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki target untuk mendatangkan atau meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan melalui 10 *top event* yang digelar.



Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo (2019)

Gambar 6. Fantastic!Ponorogo

Publisitas Program *Fantastic!Ponorogo*.

Persebaran informasi atau publikasi dari kalender wisata 2019, menjalin kerjasama dengan media partner di media sosial, *platform-platform* media sosial, maupun media *partner* resmi, yaitu media-media masa lokal maupun regional dan nasional juga menjadi fokus dari program *Fantastic!Ponorogo*. Akun resmi media sosial Dinas Pariwisata yaitu pariwisataPNG dan dinaspariwisataponorogo menjadi sumber informasi pertama yang diteruskan secara langsung oleh media *partner*, baik itu media *partner* di media sosial maupun media massa. Dilihat dari indikatornya yaitu berjalan, realisasi atau tuntas, Program *Fantastic!Ponorogo* semua telah terealisasi. Secara promosi Kabupaten Ponorogo diapresiasi dan menjadi motivasi serta menginspirasi Kabupaten/Kota yang lainnya.

Peran serta Masyarakat

Respon masyarakat dengan adanya program *Fantastic!Ponorogo* sangat baik dan positif. Masyarakat sangat antusias juga berperan aktif dalam setiap *event* yang diselenggarakan.

Adapun perbedaan sebelum dan sesudah adanya program *Fantastic!Ponorogo* ini adalah menjadikan pengalaman yang sangat berarti bagi Dinas Pariwisata pada khususnya, dikarenakan ini menjadi momentum untuk belajar Dinas Pariwisata

beserta seluruh jajaran yang berurusan dan berkepentingan dengan industri pariwisata yang ada di Kabupaten Ponorogo. Masyarakat menjadi melek media sosial. Terbukti di setiap kegiatan atau *event* di tahun 2019 menjadi viral karena media sosial yang dikelola oleh Dinas Pariwisata. Dari hal tersebut akhirnya, masyarakat merasakan bahwa Kabupaten Ponorogo mempunyai sebuah keinginan untuk meningkatkan pertumbuhan pariwisata. Dan menjadikan masyarakat Ponorogo sadar, bahwa pemerintah daerah telah berbenah dan telah memperbaiki sistem yang ada.

Keberhasilan Program *Fantastic!Ponorogo*.

Faktor yang dapat mendukung keberhasilan sinergitas program *Fantastic!Ponorogo* ini yang utama adalah komitmen dari Bupati, Wakil Bupati dan seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dalam hal ini kepala dinas-kepala dinas yang *supportive* terhadap pelaksanaan tahun wisata 2019. Sehingga, dengan komitmen itu semua serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dan juga *stakeholder-stakeholder* terkait, mulai dari paguyuban-paguyuban, komunitas, seniman, serta rekan-rekan pelaku industri pariwisata bisa menjadikan pelaksanaan tahun wisata 2019 sukses dilaksanakan.

Tidak kalah pentingnya, berkolaborasi, terkoneksi dan melakukan aksi nyata adalah indikator yang menjadikan *Fantastic!Ponorogo* sukses digelar. Berkolaborasi yang dimaksudkan adalah pemerintah bersama masyarakat dan *stakeholder* saling berkolaborasi, yang kemudian saling terkoneksi dengan membuat sebuah kerjasama dan mewujudkan manajemen yang baik dan akhirnya melakukan sebuah aksi nyata untuk mensukseskan tujuan dari RPJMD Kabupaten Ponorogo yang telah ada.

Manfaat yang telah dirasakan melalui program *Fantastic!Ponorogo* di Kabupaten Ponorogo utamanya adalah para pemilik UMKM, mulai dari industri makanan dan minuman, kemudian jasa perhotelan, oleh-oleh yang meliputi; souvenir reyog, kaos, makanan khas yang semuanya merespon sangat positif terhadap penyelenggaraan tahun wisata 2019.

Manfaat lain yang juga dirasakan adalah aktifitas media sosial. Akun resmi media sosial milik Dinas Pariwisata baik instagram, youtube dan

media yang lainnya mengalami kenaikan *follower*, *subscriber* yang cukup signifikan. Selain itu juga bertambahnya media *partner* yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

SIMPULAN

Praktik *Collaborative Governance* dalam penyelenggaraan Program *Fantastic! Ponorogo* merupakan bentuk dari pelaksanaan atau implementasi dari visi dan misi Bupati Ponorogo yang dijabarkan melalui RPJMD Kabupaten Ponorogo 2016-2021, dokumen tersebut telah di sinkronkan dengan visi dan misi RPJMN, serta RPJMD Provinsi Jawa Timur.

Praktik pelaksanaan program *Fantastic! Ponorogo* dilakukan sesuai dokumen pemerintah, melalui instruksi Bupati Kabupaten Ponorogo memberikan mandat kepada Dinas Pariwisata untuk menyelenggarakan sekitar 80 *event* wisata yang diselenggarakan secara berkesinambungan sepanjang tahun.

Dinas Pariwisata kemudian melakukan berbagai kegiatan kemitraan bersama komunitas masyarakat, pihak swasta, dan juga para *sponsorship* untuk menyelenggarakan *event*, sebagai bentuk *Collaborative Governance* yang terbuka, sehingga prosesnya menjadi optimal, karena dilakukan secara sistematis, terstruktur, koordinatif, dan juga dapat dipertanggungjawabkan.

Praktik *Collaborative Governance* memperlihatkan sinergitas yang efektif dan berhasil, karena beberapa faktor, diantaranya: 1) adanya komitmen dari Bupati, Wakil Bupati dan seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dalam hal ini para kepala dinas yang *supportive* terhadap pelaksanaan tahun wisata 2019, 2). Terwujudnya : kolaborasi, *Conectivity* antar *stakeholder*, 3). Meningkatnya antusias Masyarakat yang sangat aktif dalam berbagai *event* yang diselenggarakan, 4). Media pembelajaran bagi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, D. F., & Yuningsih, N. Y. (2016). Analisis Kebijakan Pemerintahan tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan (ITrafficking) Perempuan dan anak di Kabupaten Cianjur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan cosmogov*, 330 - 360.
- Arikunto, Suharsimi. (2013). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Reneka Cipta.
- Fernandes Simangunsong, M. I. (2018). Strategy of Local Government in Tourism Development of MarinaBeach in Bantaeng Regency SouthSulawesi Province. *Open Journal of Social Sciences* , 43 - 66.
- Gondo Widodo, T. S. (2019). The Participation of Tionghoa Ethnic in Strengthening the Local Government of Bangka Regency, Provinsi of Kepulauan Bnagka Belitung. *International Journal of Social Science* , 27 - 35.
- Hadiawan, A. (2006). *Teori Pembangunan*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Huberman, M. d. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Indonesia, K. K. *Rencana Strategi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia.
- Istayu Prastitaning Utami, K. H. (2019). Regional Government Strategies In The Development Of Sumenep Keraton Tourism In The Perspective Collaborative Governance. *Logos* , 51 - 74.
- Khoirun Nisa, Y. M. (2020). Implementasi Pemerintahan Kolaboratif dalam Penguatan nilai - nilai bela negara. *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara* , 30 - 40.
- Mudrikah, A., Sartika, D., Yuniarti, R., Ismanto, & Satia, A. B. (2014). Kontribusi sektor pariwisata terhadap GDP Indonesia tahun 2004 - 2009. *Economic Development Analysis Journal* , 362 - 371.
- Novy Setia Yunas, F. D. (2019). Colaborative Governance melalui Program kampung KB di Kabupaten Jombang. *Cosmogov* :

- Jurnal Ilmu Pemeirntahan*, 162 - 173.
- Ponorogo, D. P. (2016). *Potensi Pariwisata Kabupaten Ponorogo Tahun 2016*. Ponorogo: Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo.
- Ponorogo, P. K. (2016). *PERDA Kabupaten Ponorogo No. 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021*. Ponorogo: Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
- Ponorogo, P. K. (2016). *RPJMD Kabupaten Ponorogo 2016-2021*. Ponorogo: Bidang Perekonomian BAPPEDA Kabupaten Ponorogo.
- Simamora, R. K., & Sinaga, R. S. (2016). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA* , 79 - 96.
- Simangunsong, Fernandes. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Susanti, S., & Lubis, A. (2015). Partisipasi Politik Perempuan pada Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA* , 1 - 13.
- Sutopo. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Wulandari, W., Suranto, & Purnomo, E. P. (2019). Collaborative Government dalam Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* , 13 - 28.
- Wati, S. Z. (2013). The Implementation of Partnership Program in Gresik Regency Based on Governance Perspective (Case Study in PT Petrokimia Gresik). *Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No.5*.
- (2019). Retrieved from pariwisata.ponorogo.go.id.
- Diakses dari <https://ponorogo.go.id/2019/02/18/dari-jagongan-pers-ii-hpn-2019-di-ponorogo-kepala-daerah-se-eks-karesidenan-harus-siap-kolaborasi/>, pada 15 Mei 2019)
- Diakses dari <https://m.solopos.com/pemkab-ponorogo-kesulitan-kembangkan-kawasan-wisata-telaga-ngebel-1015942> pada 15 Mei 2019)